

**IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM
UNTUK PEREMPUAN (SPP)
DI KECAMATAN TABIR LINTAS KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik*



**OLEH:
MUSDALIFAH HERLITA
2009/97282**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2013 pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

**Implementasi Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) di
Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi**

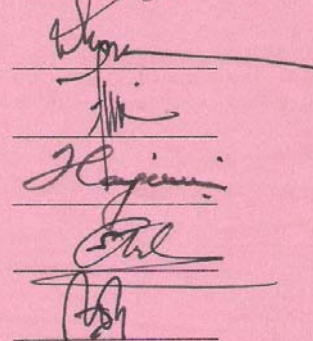
Nama : Musdalifah Herlita
TM/NIM : 2009/97282
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Juli 2013

Tim Penguji:

	Nama
Ketua	: Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd.
Sekretaris	: Dr. Fatmariza, M.Hum.
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.
Anggota	: Dra. Hj. Aina, M.Pd.
Anggota	: Alia Azmi, S.IP, M.Si.

Tanda Tangan



Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Implementasi Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Oleh: Musdalifah Herlita, 2009 – 97282.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan simpan pinjam untuk perempuan di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program simpan pinjam itu dan mengidentifikasi upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program simpan pinjam untuk perempuan di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi program simpan pinjam di Kecamatan Tabir Lintas. Penentuan informan dengan menggunakan *purposive sampling* Informan adalah orang-orang yang kaya akan pengetahuan tentang implementasi SPP di daerah Tabir Lintas, yaitu: Pengurus PNPM-MP Kecamatan Tabir Lintas, Pengurus SPP, anggota SPP (Penerima Dana), pengurus yang bukan anggota SPP. Jenis data adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi langsung di lapangan. Teknik analisis data melalui yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian menunjukkan SPP di Kecamatan Tabir Lintas telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai penelitian berlangsung terdiri dari 35 kelompok SPP, dengan kategori kelompok pemula, berkembang dan matang. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan SPP tersebut adalah kurangnya komunikasi antara aparat pelaksana dan masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dana pinjaman yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah. Untuk mencari jalan keluarnya diperlukan kedepannya swadaya masyarakat serta komunikasi yang baik antara aparat dan masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan SPP di Kecamatan Tabir Lintas belum terlaksana secara optimal dan terdapat kendala-kendala dalam pelestarian. Bagi semua aparat pelaksana perlu dilaksanakan koordinasi antara petugas pelaksana dengan semua pihak terkait, sehingga tujuan program SPP dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi umat yang dicintainya sebagai bekal dunia akhirat.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan judul **“Implementasi Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”**.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Politik Universitas Negeri Padang.
2. Drs. M.Fachri Adnan, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu sosial Politik.
3. Dr. H. Helmi Hasan M.Pd sebagai Pembimbing I dan Dra Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Pembimbing II.
4. Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, Dra. Hj. Aina, M.Pd. dan Alia Azmi, SIP, M.Si. selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merangin yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
6. Camat Tabir Lintas dan Pengurus PNPM Tabir Lintas yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa untuk Ayah dan Bunda tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta do'anya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena, itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak atau pembaca yang budiman untuk kesempurnaan tulisan di masa yang akan datang.

Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga penelitian sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah, Batasan dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teori	11
1. Konsep Dasar Pemberdayaan	11
2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin	12
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	14
4. Simpan Pinjam Khusus Perempuan	20
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.....	28
6. Penelitian yang Relevan.....	38
B. Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	44
D. Jenis Data	45
E. Teknik/Alat Pengumpul Data.....	45
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan.....	50
1. Temuan Umum	50
2. Temuan Khusus.....	57
a. Pelaksanaan	57
b. Kendala	88
c. Upaya	91

B. Pembahasan.....	93
a. Pelaksanaan.....	94
b. Kendala	98
c. Upaya	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Tabir Lintas.....	5
TABEL 2	Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.....	6
TABEL 3	Jumlah Penduduk Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Berdasarkan Desa/Kelurahan	51
TABEL 4	Jumlah Penduduk Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Berdasarkan Usia.....	52
TABEL 5	Jumlah Penduduk Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
TABEL 6	Jumlah Penduduk Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dilihat berdasarkan Latar Belakang Mata Pencaharian.....	55
TABEL 7	Penduduk Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Berdasarkan Rata-rata Pendapatan	56
TABEL 8	Jumlah Rumah Tangga Miskin Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.....	57
TABEL 9	Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok	61
TABEL 10	Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok SPP di Kecamatan Tabir Lintas.....	63
TABEL 11	Jumlah Kelompok SPP di Kecamatan Tabir Lintas Berdasarkan Kategori Perkembangan Kelompok SPP	64
TABEL 12	Perbedaan masing-masing kelompok.....	65
TABEL 13	Perguliran Dana SPP di Kecamatan Tabir Lintas Berdasarkan Desa Tahun 2013	80
TABEL 14	Kelompok-kelompok yang bermasalah Tabir Lintas dari Tahun 2011 s/d 2013.....	85

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Alur Kegiatan SPP.....	27
GAMBAR 2 Alur Pengembangan Kelompok.....	67
GAMBAR 3 Alur Kegiatan SPP di Kec. Tabir Lintas.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Hal ini juga sejalan dengan upaya memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih bermartabat. Menurut BPS pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 29,13 juta orang, artinya terdapat 11,96 % dari penduduk Indonesia berada pada kategori miskin. (<http://www.bps.go.id/?news=940>)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat ada 13 ciri-ciri masyarakat miskin yaitu: a) Hidup dalam rumah dengan ukuran lebih kecil dari 8 M2 per orang b) Hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau lantai kayu berkualitas rendah/bambu c) Hidup dalam rumah dengan dinding terbuat dari kayu berkualitas rendah/bambu/rumbia/tembok tanpa diplester d) Hidup dalam rumah yang tidak dilengkapi dengan WC/bersama-sama dengan rumah tangga lain e) Hidup dalam rumah tanpa listrik f) Tidak mendapatkan fasilitas air bersih/sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan g) Menggunakan kayu bakar, arang atau minyak tanah untuk memasak h) Mengonsumsi daging atau susu seminggu sekali i) Belanja satu set pakaian baru setahun sekali j) Makan hanya sekali atau dua kali sehari k) Tidak mampu membayar biaya kesehatan pada Puskesmas terdekat l) Pendapatan

keluarga kurang dari Rp. 600.000,- per bulan m) Pendidikan Kepala Keluarga hanya setingkat Sekolah Dasar. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, pemerintah telah mencanangkan suatu program yang berlandaskan kepada konsep pemberdayaan masyarakat.

Dalam keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan No: 25/kep/menko/kesra/vii/2007 dijelaskan bahwa secara umum kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari dua komponen, yaitu kegiatan penyediaan infrastruktur dasar pedesaan skala kecil, dan penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Infrastruktur dasar pedesaan skala kecil mencakup 6 kategori, yaitu: transportasi, peningkatan produksi pertanian, peningkatan pemasaran pertanian, air bersih dan sanitasi lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. PNPM mandiri pedesaan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Tujuan pemberdayaan, menurut Ambar (2004), adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif,

dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian, untuk menjadi mandiri, perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia (MSDM) yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material (Muslim, 2006 : 153)

Konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu : suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan taraf hidupnya. A.M.W Pranarka mengemukakan konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia ataupun sekelompok manusia dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses aktualisasi eksistensinya. Maka perhatian gerakan pemberdayaan adalah untuk dapat menunaikan tugas aktualisasi eksistensinya seluas-luasnya dan setinggi-tingginya. (Ony, 1996;263)

Pemberdayaan masyarakat secara substansi berarti proses memajukan, mengembangkan, dan memperbesar kemampuan masyarakat. Dalam kaitan ini, masyarakat yang ada bukan saja diarahkan pada kemajuan fisik (materi) namun juga pada kemajuan nilai-nilai non materi. Dengan begitu pemberdayaan masyarakat bukan saja membutuhkan SDM (masyarakat atau fasilitator), modal dan sarana, tapi juga membutuhkan nilai-nilai yang jelas, yang akan memandu serta mengorientasikan kearah mana perubahan akan dilakukan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan berfungsi bukan menjadi obyek tapi menjadi subjek. Merekalah yang secara bersama-sama akan menentukan kearah mana mereka akan berkembang.

Salah satu bentuk pemberdayaan yang dikelola oleh PNPM Mandiri adalah kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Program ini merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Bentuk kegiatan yang didanai oleh PNPM adalah memberikan dana pinjaman sebagai bahan tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan ini untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha. (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa : 2008)

Maksud dari penjelasan diatas tadi adalah kegiatan simpan pinjam khusus perempuan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok perempuan didalam pemberian dana pinjaman untuk dijadikan modal atau tambahan modal bagi perempuan dalam membuat suatu usaha yang bisa menjadikan perempuan tersebut membuka suatu usaha baik usaha industry rumah tangga, maupun usaha lainnya, seperti berjualan pakaian, alat-alat kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Dimana dari hasil usaha yang dilakukan oleh perempuan tadi akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian keluarganya, seperti dengan perempuan itu memiliki usaha sendiri maka dia akan memiliki keuntungan yang dapat digunakan nya untuk keperluan keluarganya, dengan menggunakan dana yang diberikan oleh program simpan pinjam khusus perempuan tadi.

Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi merupakan salah satu kecamatan yang juga melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu bentuk program pemberdayaan yang dilakukan adalah Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) semenjak tahun 2010 sampai tahun 2012. Desa Sido Lengo, Tambang Baru, Desa Sido Harjo, Desa Koto Baru dan Desa Mensango merupakan desa-desa yang ada di Kecamatan Tabir Lintas dan mendapatkan bantuan dana untuk melakukan kegiatan simpan pinjam perempuan.

Di Kecamatan Tabir Lintas di temukan masyarakat miskin dibawah ini:

TABEL 1

Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Tabir Lintas

No	Desa	Jumlah	Ket
1	Koto Baru	85 KK	
2	Sido Lego	131 KK	
3	Tambang Baru	104 KK	
4	Mensango	72 KK	
5	Sido Harjo	49 KK	
Jumlah		436 KK	

Sumber: Kantor Kecamatan Tabir Lintas tahun 2013

Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat yaitu untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha. Sehingga perempuan bisa mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dengan adanya simpan pinjam khusus perempuan, perempuan bisa membuat suatu usaha yang bisa menghasilkan dan meningkatkan ekonomi rumah tangganya.

Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan laporan tertulis tim pelaksana kegiatan dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam banyak kelompok yang terlambat bahkan tidak mampu mengembalikan dana yang dipinjamkan melalui PNPM-MP tersebut. Banyak faktor yang diasumsikan menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut, diantaranya tingkat pendidikan penduduk yang rendah, pengelolaan simpan pinjam yang kurang baik, serta jumlah dana yang dipinjamkan kepada masyarakat. Untuk tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2
Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah (Jiwa)	%
1	Belum Sekolah	325	8,29	491	13,25	816	10,71
2	SD	1.389	35,47	1.005	27,12	2.394	31,41
3	SMP	1.114	28,44	924	24,93	2.038	26,74
4	SMA	509	13,00	677	18,27	1.186	15,56
5	Sarjana	286	7,30	401	10,82	687	9,01
6	Buta Aksara	293	7,48	205	5,53	498	6,53
Jumlah		3.916	100	3.706	100	7.622	100

Sumber : Data dari Kantor Camat Tabir Lintas Kabupaten Merangin Jambi tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 7.622 Jiwa penduduk kecamatan tabir lintas paling banyak pendidikan penduduk adalah SD dengan jumlah 2.394 Jiwa atau 31,41 %, SMP dengan jumlah 2.038 jiwa atau 26,74 %, SMA 1.186 Jiwa atau 15,56 %, Sarjana dengan jumlah 687 Jiwa atau 9,01 %, Buta Aksara 498 Jiwa atau 6,53 % dan Belum Sekolah 816 Jiwa atau 10,71 %. Jadi

berdasarkan data diatas penduduk Kecamatan Tabir Lintas Paling banyak berpendidikan SD dan SMP.

Akibat dari latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga menjadikan dana pinjaman yang diberikan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan fasilitator kecamatan mengemukakan dana yang sebelumnya ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mendukung peningkatan modal masyarakat, malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (wawancara langsung dengan Bapak Iwan Joni HS tanggal 20 Februari 2013)

Di kecamatan Tabir Lintas tujuan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan untuk peningkatan modal kelompok belum tercapai dengan baik, karena masih banyak kelompok perempuan yang tidak menjadikan dana pinjaman untuk peningkatan modal tapi digunakan untuk hal-hal lain yang tidak sesuai dengan apa yang diperuntukan oleh pemerintah. Sehingga banyak nya dana tersebut angsurannya menjadi tersendat-sendat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami mengapa Program Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi belum terlaksana atau belum memberi manfaat secara Optimal, yang akan dituangkan dalam penelitian berjudul :
“Implementasi Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten merangin Provinsi Jambi”

B. Identifikasi, Batasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian diatas dan keterangan yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Implementasi program yang masih belum berjalan dengan baik
- b. Implementasi program yang masih menemui kendala-kendala.
- c. Pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- d. Latar belakang pendidikan masyarakat miskin yang masih rendah.
- e. Tujuan kegiatan simpan pinjam kelompok untuk peningkatan modal kelompok yang belum tercapai.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dapat mempertajam objek pembahasan maka yang menjadi batas masalah dalam penelitian ini adalah implementasi program simpan pinjam untuk perempuan (SPP) di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, kendala yang dihadapi selama proses tersebut, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat rumusan permasalahan penelitian ini adalah mengapa program simpan pinjam untuk perempuan (SPP) di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi belum berjalan dan belum memberi

manfaat terhadap perempuan secara optimal. Untuk memantau penelitian ditulis pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kegiatan simpan pinjam khusus perempuan di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam hal ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan Program Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam Program Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
3. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan di kecamatan tabir lintas kabupaten merangin provinsi jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Sebagai salah satu bentuk penerapan dari teori keilmuan yang telah dipelajari khususnya dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat.
- b. Sebagai tambahan referensi bagi pembaca dibidang pemberdayaan masyarakat miskin, terkait dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi kebijakan PNPM-MP untuk penerapan lebih lanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat atas segala hasil yang penulis dapatkan berkenaan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Tabir Lintas.
- c. Bagi penulis, untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat

A.M.W Pranarka dalam Ony (1996:263) mengemukakan konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu: suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia ataupun sekelompok manusia dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses aktualisasi eksistensinya.

Smith dalam Wibowo (1996:1) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah cara mendorong orang menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktifitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Sedangkan C. Greendberg dan baron dalam Wibowo (1996:3) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses dimana pekerja diberi peningkatan sejumlah otonom dan keleluasaan dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Suhendra (2006;43) menjabarkan ada beberapa indikator yang menyatakan suatu masyarakat telah berdaya, indikator tersebut yaitu (a) mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada dimasyarakat, (b) dapat berjalannya “bottom up planning”, (c) kemampuan dan aktivitas ekonomi, (d) kemampuan

menyiapkan masa depan keluarga, (e) kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara atau proses yang memberikan orang lain pengetahuan dan kemampuan untuk berusaha lebih baik dari sebelumnya demi mencapai tujuan mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2. Pemberdayaan masyarakat miskin

Kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat, kemiskinan merupakan ketidak berdayaan sekelompok masyarakat atau orang terhadap system yang diterapkan oleh suatu pemerintah, adanya kerawanan dalam kehidupan sehingga masyarakat terisolasi, mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi.

Konsep pemberdayaan masyarakat miskin dimaksudkan sebagai upaya merubah kondisi dan perilaku rakyat miskin sehingga mandiri dan produktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kompleksitasnya masalah

yang dihadapi rakyat miskin disebabkan oleh ketidak berdayaan rakyat dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu:

- a. Sumber daya alam yang kurang mendukung
- b. Masih rendahnya tingkat pengenalan dan penerapan teknologi.
- c. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dan dengan produktifitas tenaga kerja yang rendah sehingga out put yang dihasilkan tidaklah maksimal.
- d. Prasaran dan permodalan yang kurang mendukung.
- e. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga pelayanan produksi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada 13 ciri-ciri masyarakat miskin yaitu:

- a. Hidup dalam rumah dengan ukuran lebih kecil dari 8 M2 per orang.
- b. Hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau lantai kayu berkualitas rendah/bamboo
- c. Hidup dalam rumah dengan dinding terbuat dari kayu berkualitas rendah/bambu/rumbia/tembok tanpa diplester.
- d. Hidup dalam rumah yang tidak dilengkapi dengan WC/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Hidup dalam rumah tanpa listrik.
- f. Tidak mendapatkan fasilitas air bersih/sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

- g. Menggunakan kayu bakar, arang atau minyak tanah untuk memasak.
- h. Mengonsumsi daging atau susu seminggu sekali.
- i. Belanja satu set pakaian baru setahun sekali.
- j. Makan hanya sekali atau dua kali sehari.
- k. Tidak mampu membayar biaya kesehatan pada Puskesmas terdekat.
- l. Pendapatan keluarga kurang dari Rp. 600.000,- per bulan
- m. Pendidikan Kepala Keluarga hanya setingkat Sekolah Dasar.

Melihat kondisi ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi maupun social, pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah penanggulangannya diantara: a) pelaksanaan program pembangun di daerah terpencil, b) peningkatan pendidikan masyarakat, c) pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat yang juga bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.

3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat miskin

- a. Bentuk pelaksanaan program

Pelaksanaan suatu program dapat dilihat 2 cara yaitu dengan bentuk topdown dan button up. Pelaksanaan secara top down merupakan sautu proses pelaksanaan kegiatan dimana semua alur baik dalam bentuk ide, bentuk kegiatan dan dana berasal pemerintah pusat, disini masyarakat hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pelaksanaan

secara bottom up merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan dimana masyarakat dituntut untuk memberikan ide dan masukan tentang kegiatan apa yang cocok dilaksanakan di daerah tempat mereka tinggal. PNPM-MP merupakan suatu program yang bersifat bottom up. Disini masyarakat diminta ikut berpartisipasi untuk menyumbangkan ide dan pemikiran mereka tentang kegiatan apa yang menurut mereka cocok dilaksanakan di wilayah mereka, ide kegiatan tersebut diberikan kepada pemerintah untuk diseleksi dan didanai.

b. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program

Riant Nugroho (2006:167) menyatakan ada 4 indikator yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan suatu kebijakan empat indikator tersebut adalah pertama) ketepatan kebijakan di nilai dari sejauh mana kebijakan yang ada bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah, kedua) ketepatan pelaksanaan, ketiga) ketepatan sasarannya, keempat) ketepatan lingkungannya.

Mustopadidjaja (2003:37) menyatakan bahwa berhasil atau gagalnya suatu kebijakan tergantung pada beberapa kondisi yaitu a) ketepatan pelaksanaan kebijakan, b) konsisten dan keberlanjutan pelaksanaannya, c) terjadi tidaknya perkembangan di luar perkiraan.

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada pendapat Mustopadidjaja yang mengemukakan bahwa berhasil atau gagalnya suatu kebijakan tergantung dari beberapa faktor yang telah dikemukakan diatas.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan program yaitu :

- 1) Pengelolaan, Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan PNPM-MP terdapat prinsip transparansi dan partisipatif, yang berarti bahwa semua kegiatan atau proses PNPM-MP (perencanaan, pengambilan keputusan usulan kegiatan yang dibiayai dana bantuan PNPM-MP, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan) dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Salah satu indicator keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan atau proses PNPM-MP. (Buku penjelasan pemberdayaan masyarakat dan desa)

Jadi dalam program nasional pemberdayaan masyarakat pengelolaan dilakukan oleh segala unsure, baik pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan merupakan faktor yang sangat penting didalam pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pengelolaan yang baik, maka suatu program akan bisa berjalan dengan baik pula.

2) Program

Program merupakan suatu rancangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu kegiatan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu pemberdayaan masyarakat faktor-faktor yang ada dalam pemberdayaan adalah program, karena untuk dapat memberdayakan masyarakat kita harus memiliki program-program apa saja yang akan kita lakukan didalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

3) Penerima

Penerima adalah seseorang yang mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh seseorang. Didalam PNPM-MP penerima PNPM-MP adalah masyarakat, karena didalam pemberdayaan masyarakat yang hendak menjadi sasaran dalam pemberdayaan itu adalah masyarakat miskin. Sehingga penerima PNPM-MP adalah masyarakat Miskin, didalam

Simpan Pinjam khusus perempuan yang menjadi penerima adalah perempuan yang ingin meningkatkan ekonomi rumah tangganya.

c. Kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin

Pada setiap kebijakan public yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengalami adanya keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber daya yang terbatas atau dapat disebut dengan kendala.

Menurut Hansen dalam Setia Budi (2005;27), jenis kendala berdasarkan asalnya adalah sebagai berikut.

- 1) Kendala internal, merupakan faktor-faktor yang membatasi suatu instansi yang berasal dari dalam berupa kendala sumber daya. Dalam penelitian ini kendala berupa kurang profesionalnya kinerja tim pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Kendala eksternal, merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar dapat berupa pengaruh lingkungan tempat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin tersebut.

Dari penjelasan diatas tadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan suatu program akan munculkan kendala-kendala, baik datang nya dari internal maupun dari eksternal. Dimana kendala yang datang dari internal berasal dari dalam tubuh pengurus atau pun anggota dari suatu program, sedangkan kendala yang datang dari

eksternal atau luar, berupa pengaruh dari lingkungan tempat pelaksanaan suatu program tersebut.

d. Upaya untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat miskin

Gunanjar Kartasasmita (1995;4) mengatakan upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses keberbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, dan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara yang sudah maju dari belum maju/berkembang. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan keberpihakan melalui pembangunan ekonomi rakyat, yaitu usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak makin

tertinggal jauh, melainkan dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi perkembangannya.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan masyarakat miskin lebih menekankan kepada aspek kemandirian dengan memberikan bantuan dari pemerintah guna meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

4. Simpan pinjam khusus perempuan

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan penyaluran dana pinjaman bergulir bagi kelompok perempuan dalam skala mikro (*mikro finance*). Dana yang dialokasikan untuk kegiatan SPP yaitu 25 persen dari total dana Bantuan Langsung Tunai (BLM) per kecamatan.

Secara umum kegiatan SPP bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan khusus kegiatan SPP: (1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha/sosial dasar; (2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha; (3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam kaum perempuan.

Sasaran kegiatan SPP yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan sosial

dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat. Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Kriteria kelompok perempuan yang mendapat pinjaman dana yaitu:

(1) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, satu sama lain mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun; (2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpan dan dana pinjaman yang telah disepakati; (3) Mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota; (4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik; (5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Tahapan seleksi di tingkat desa untuk memilih kelompok SPP: (1) Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP; (2) Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa; (3) Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan.

Sedangkan, syarat penulisan usulan SPP harus memuat beberapa hal sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan kondisi kelompok SPP; (2) Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota,

kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, dan perhitungan rencana kebutuhan dana; (3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

Kelompok wanita harus mengajukan proposal yang ditetapkan melalui jalur Musyawarah Khusus untuk Perempuan (MKP). Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal: (1) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan pinjaman menurun atau tetap; (2) Jangka waktu pinjaman sumber dana.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maksimal 12 bulan; (3) Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur tiga kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperlihatkan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok; (4) Angsuran langsung dari kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dalam Buku Penjelasan Petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

a) Tujuan

1) Tujuan Umum, secara umum kegiatan ini untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

2) Tujuan khusus

- a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- b. Memberikan kesempatan kepada kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

b) Ketentuan Dasar

- 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- 2) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

- 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- 5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dan bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

c) Sumber modal

Modal usaha kegiatan simpan bersumber dari simpanan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan dalam koperasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota jika ia masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan merupakan modal awal bagi kelompok. Simpanan pokokm dibayar satu kali pada saat mendaftar menjadi anggota kelompok, simpanan wajib dibayar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masing-masing anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil kecuali keluar dari keanggotaan.

Simpanan pokok akan menjadi besar, karena bertambahnya jumlah anggota koperasi sedangkan simpanan wajib dan simpanan sukarela sangat tergantung kepada kesadaran anggota. Dalam

kelompok simpan pinjam, karena keanggotaannya sangat heterogen sulit untuk memiliki rasa kebersamaan. Oleh sebab itu mendidik anggota agar memiliki solidaritas, kesetiakawanan perlu dibangun, sebab kesatuan dan persatuan dalam kelompok berakumulasi pada pengembangan modal dan usaha.

Faktor lain penyebab lambatnya perkembangan modal yang berasal dari anggota adalah: (1) kondisi sebagian besar anggota kelompok yang relative sederhana. Mereka hamper tidak memiliki surplus pendapatan untuk ditabung, (2) kurangnya budaya menabung pada sebagian besar anggota, mereka lebih suka meminjam dari penyimpanan dan (3) sebagian besar anggota kelompok lebih memilih menyimpan dananya di tempat lain karena jelas pengembalian yang akan diterimanya.

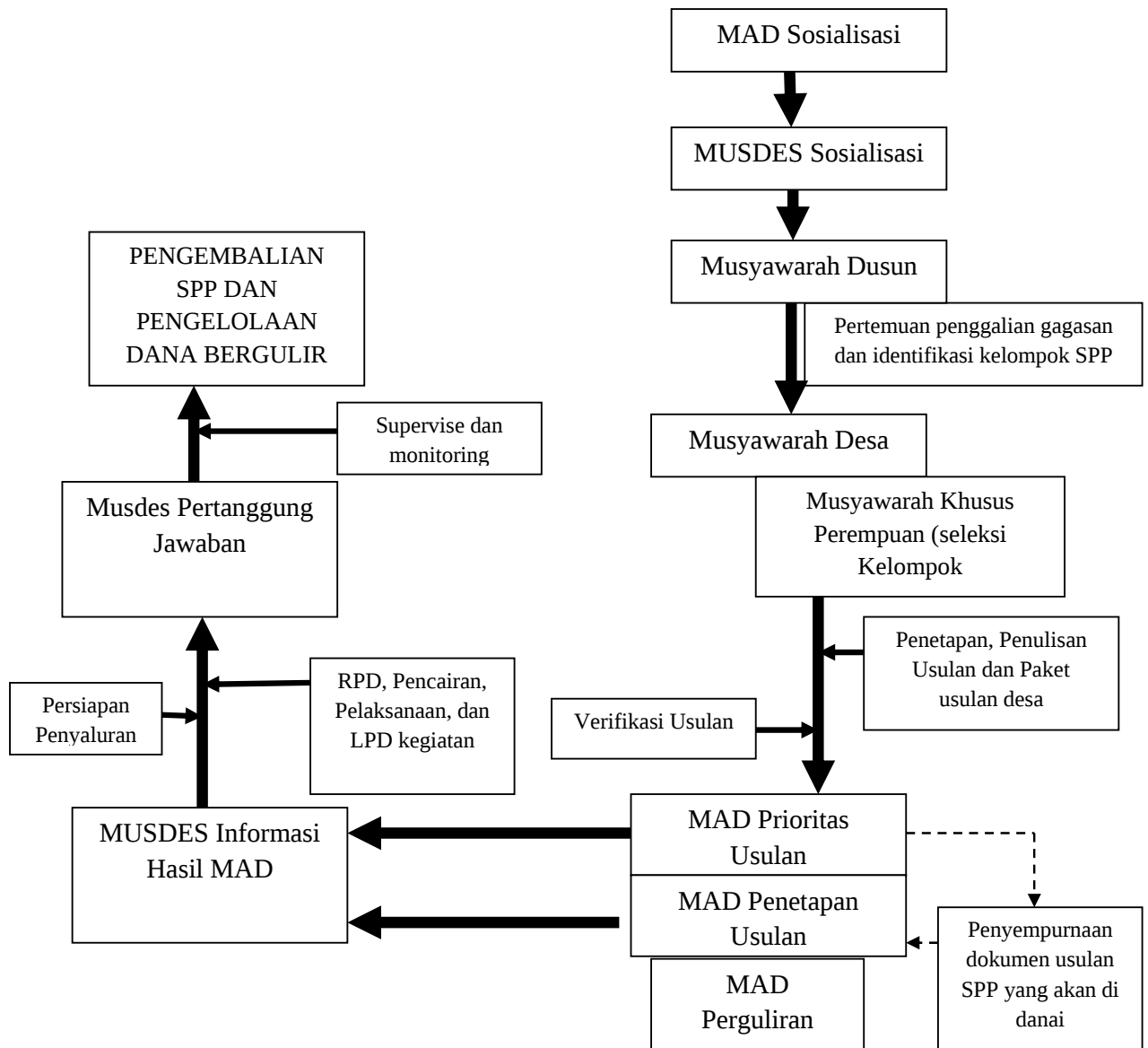
d) Pelaksana

Organisasi simpan pinjam terdiri dari pengurus, manejer, karyawan dan angota, dalam organisasi tugas dan tanggung jawab harus jelas. Kunci keberhasilan usaha simpan pinjam adalah adanya saling percaya antara pengurus, manejer, karyawan dan anggota. Kepercayaan ini harus tetap dipelihara dan dijaga untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dan akan dilaksanakan pengurus.

Tugas lain yang perlu mendapat perhatian dan tambahan dari tugas sebelumnya, mencakup:

- (1) membangun kebersamaan dan persatuan antara pengurus manajer dan anggota untuk mencapai tujuan simpan pinjam,
- (2) membina dan memelihara solidaritas dan setiakawan didalam organisasi dan anggota,
- (3) membangun system pendidikan dari mulai menyimpan, mengembangkan dan pengawasan,
- (4) memberikan pelayanan yang tepat waktu, tepat sasaran dengan dukungan administrasi yang baik dan
- (5) pemberian bunga pinjaman sesuai dengan kemampuan kelompok.

Gambar.1
Alur kegiatan SPP



Sumber: Buku Penjelasan Petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

a. Pengertian dan Tujuan PNPM-MP

1) Pengertian PNPM-MP

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri Pedesaan:

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM MP dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. *(Penjelasan Petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan)*

2) Tujuan PNPM-MP

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PNPM-MP ini adalah : pertama) tujuan umum dari pelaksanaan PNPM-MP meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Kedua) tujuan khusus diantaranya :

- a) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat adat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar representative dan akuntabel.
- c) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
- d) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e) Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan diwilayahnya.
- f) Meningkatnya modal social masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi social dan budaya serta untuk melestarikan kearifan local.
- g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

*(Penjelasan Petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri
Pedesaan)*

b. Landasan Hukum Pelaksanaan Program

Dasar hukum pelaksanaan PNPM-MP mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya pelaksanaan PNPM-MP. Peraturan Perundangan khususnya terkait system pemerintah, perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1) Sistem pemerintah

Landasan hukum pelaksanaan PNPM-MP dilihat dari system pemerintahan, yaitu menggunakan dasar peraturan perundangan system pemerintah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah Desa
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan.
- d) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005 tentang tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Landasan hukum pelaksanaan PNPM-MP di lihat dari system pemerintahan terdapat dalam undang-undang tentang pemerintah daerah yang berisikan tentang segala hal-hal yang

menyangkut aturan-aturan tentang pemerintahan daerah. Dimana dalam PNPM-MP ini dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di daerah. Atas dasar penjelasan diatas maka Undang-undang tentang pemerintah daerah dan peraturan-peraturan pemerinta tentang desa dan kelurahan serta Peraturan Presiden tentang tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menjadi landasan hukum PNPM-MP dilihat dari system pemerintahan.

2) Sistem Perencanaan

Dasar peraturan perundangan system perencanaan terkait adalah:

- a) Undang-undang Nmor 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- b) Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- c) Peraturan presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional 2004-2009.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- e) Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- f) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh isu utama gender dalam pembangunan nasional.

Dilihat dasar-dasar hukum perencanaan diatas dapat kita simpulkan bahwa landasan hukum dari PNPM-MP di tinjau dari system perncanaan, menyangkut dalam perencanaan Nasional baik jangka panjang maupun jangkah menengah, karena dalam pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk perencanaan nasional, pemerintah harus merencanakan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu la mengapa Perencanaa pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dari PNPM Mandiri ditinjau dari system perencanaan.

3) Sistem Keuangan Negara

Dasar peraturan perundang-undangan system keuangan Negara ialah :

- a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- b) Undang-undang No 2 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455)
- c) Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- d) Peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
 - e) Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang cara pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597)
 - f) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - g) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor. 005/MPPN/06/2006 tentang tata cara perencanaan dan pengajuan usulan serta penilaian kegiatan yang dibiayai dari pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - h) Peraturan Menteri keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang tata cara pemberian Hibah kepada daerah.
 - i) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Landasan hukum PNPM Mandiri dilihat dari system keuangan, dilihat dari segala peraturan-peraturan yang berhubungan

dengan keuangan Negara, karena segala pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan program PNPM Mandiri adalah dana dari keuangan Negara, jadi oleh karena itu mengapa landasan hukum PNPM Mandiri dilihat dari system keuangan menyangkut segala peraturan tentang keuangan Negara.

c. Ruang lingkup Kegiatan

Pada dasarnya ruang lingkup kegiatan PNPM terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, sebagaimana dijabarkan dalam modul pelatihan kader pemberdayaan masyarakat jorong dan kader teknis. Ruang lingkup kegiatan PNPM meliputi hal yaitu: *pertama*, pendidikan masyarakat, bidang pendidikan masyarakat merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada musyawarah antar desa. Semua jenis kegiatan formal dan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin (RTM). Jenis kegiatan yang didanai oleh PNPM dikategorikan dalam empat bagian yaitu: (a) beasiswa diperuntukkan bagi murid/siswa dari RTM. (b) peningkatan pelayanan pendidikan. (c) pelatihan keterampilan masyarakat dan (d) pengembangan wawasan dan kepedulian.

Kedua, kesehatan masyarakat. Sejalan dengan kebijakn pemerintah melalui program menuju Indonesia Sehat 2015, PNPM-MP mengembangkan kegiatan penyediaan bantuan kesehatan masyarakat, khususnya RTM. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi

permasalahan kesehatan bagi RTM. Jenis kegiatan yang didanai oleh PNPM dikategorikan dalam empat bagian yaitu: (a) Penyuluhan kesehatan, (b) Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, (c) peningkatan kesehatan lingkungan, (d) peningkatan kesehatan mandiri.

Ketiga, kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP), kegiatan SPP merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Bentuk kegiatan yang didanai oleh PNPM-MP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman.

Keempat, bidang prasarana, bidang prasarana dan sarana merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada musyawarah desa, semua jenis kegiatan prasarana dan sarana yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi, derajat kesehatan, kualitas hidup dan kapasitas RTM dapat diusulkan untuk didanai.

Kelima, kegiatan peningkatan kapasitas / keterampilan kelompok ekonomi. Kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh RTM merupakan kegiatan yang akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan RTM. Selain tambahan modal hal yang diperlukan untuk peningkatan usaha adalah peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif adalah jenis kegiatan yang berkaitan langsung

dengan peningkatan kapasitas anggota kelompok usaha ekonomi dan yang akan berdampak langsung peningkatan usaha masyarakat. Bentuk kegiatan yang didanai oleh PNPM antar lain : (a) Pelatihan-pelatihan pengenalan alat produksi yang baru. (b) Pelatihan teknologi produksi (c) pelatihan manajemen.

d. Pendekatan Program PNPM-MP

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat local.
3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya local dalam proses pembangunan partisipatif.
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik social, budaya dan geografis. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan berkelanjutan.

(Buku Penjelasan Petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

e. Mekanisme pengelolaan kegiatan

Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

1. Perencanaan kegiatan

Perencanaan kegiatan meliputi tahap perncanaan dan sosialisasi awal serta perencanaan didesa dikecamatan dan dikabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi dimulai dari musyawarah antar desa sosialisasi sampai pelatihan kader pemberdayaan masyarakat. Perencanaan kegiatan dimulai dengan musyawarah antar desa priorotas usulan sampai dengan musyawarah antar desa penetapan usulan.

2. Pelaksanaan kegiatan

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia. Unit pelaksana kegiatan, yang perlu mendapat pelatihan terlebih dahulu.

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan musyawarah antar desa penetapan usulan serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

3. Pelestarian kegiatan

Pengelolaan kegiatan PNPM mandiri pedesaan harus dijamin dapat member manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Hasil-hasil kegiatan PNPM mandiri pedesaan yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan pendidikan dan kesehatan merupakan asset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan.

(Buku Penjelasan Petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

6. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan tentang program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) juga diteliti oleh Robby Maulana tahun 2010 dengan Judul Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (Studi di Nagari Lambah dan Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Robby Maulana ini bahwa pelaksanaan simpan pinjam khusus perempuan di Nagari Lambah dan panampuang sudah terlaksana tetapi belum optimal. Untuk itu perlu diperbaiki dari semua pihak.

Alasannya meneliti mengenai Simpan Pinjam Khusus perempuan di Nagari Lambah dan Nagari Panampuang karena tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan tersebut, yang diakibatkan

karena tidak sesuai pemanfaatan dana pinjaman yang diberikan dengan yang semestinya, sehingga pengembalian dana tersebut juga menjadi kurang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Robby Maulana sama dengan penelitian yang saya lakukan ini sama-sama meneliti tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan, tetapi terdapat perbedaan dari perumusan masalah dan perbedaan dari masalah yang dihadapi dari daerah yang berbeda. Dilihat dari usaha yang dilakukan masyarakat di dalam penggunaan dana simpan pinjam khusus perempuan ini, Robby Maulana masyarakat di tempat dia meneliti lebih ke Industri rumah tangga, sedangkan di tempat saya meneliti kaum perempuan yang mendapatkan dana tersebut lebih ke jualan kebutuhan sehari-hari dan membuka warung-warung kecil-kecilan serta berjualan pakaian, dsbnya. Perbedaan nya juga dapat dilihat dari latar belakang kehidupan dan kebudayaan masyarakat di daerah penelitian yang sebelumnya dan daerah yang akan saya teliti nanti. Baik dari mata pencarian masyarakat, perekonomian dan tingkat pendidikan.

B. Kerangka Konseptual

Pemerintah telah menyiapkan sebuah strategi pemberdayaan masyarakat yang dibingkai dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM Mandiri adalah suatu program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk program yang

ada dalam PNPM Mandiri adalah Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Yang bertujuan untuk Memberikan kesempatan kepada kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

Program Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) telah dilaksanakan di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam di daerah ini banyak kelompok yang terlambat bahkan tidak mampu mengembalikan dana yang dipinjamkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat tersebut. Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan ini terdapat berbagai macam kendala didalam pelaksanaan program ini.

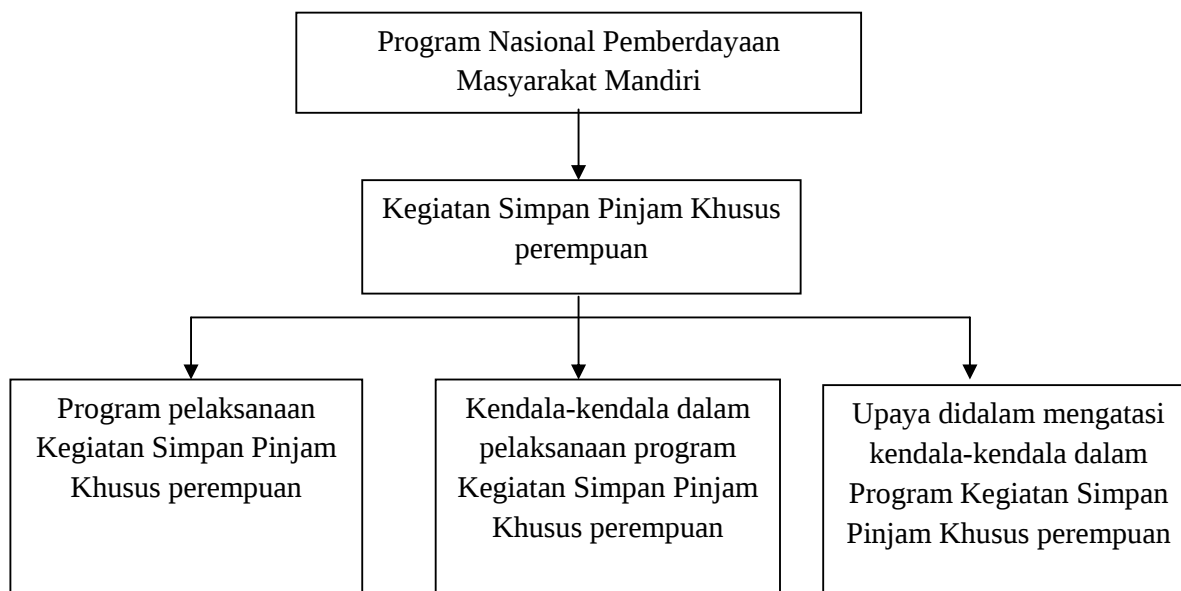
Kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan simpan pinjam khusus perempuan ini datang dari berbagai pihak baik dari pengurus maupun penerima. Salah satu bentuk kendala yang datang dari pengurus adalah kurangnya sosialisai dan penjelasan oleh pengurus tentang tujuan dan manfaat dari dana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan kendala yang datang dari penerima salah satunya adalah pemanfaatan dana yang tidak sesuai oleh penerima sehingga sering terjadi hambatan didalam pengembalian dana. Oleh karena itu berdasarkan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam

husus perempuan ini, maka diperlukan upaya didalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan ini.

Berangkat dari masalah tersebut, salah satu bentuk upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu perlunya pemerintah melakukan revisi kembali pelaksanaan PNPM baik dalam hal sosialisasi, pelaksanaan maupun manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat melalui program tersebut, maka dalam pelaksanaan PNPM nantinya akan didapatkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir dalam menggambarkan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teorits, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut :

Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Tabir Lintas sebagai perwujudan dari PNPM belum terlaksana optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala-kendala yang menghambat proses pelaksanaannya program tersebut. Kendala yang paling mempengaruhi adalah keterlambatan masyarakat didalam pengembalian dana pinjaman sebagaimana mestinya. Pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan membuat tujuan dari program ini tidak terlaksana secara baik.
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan terbagi atas dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Internal adalah: 1) kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan antara unit pelaksana kegiatan dengan penanggung jawab operasional kegiatan, maupun tim pelaksana kegiatan dengan unit pelaksana kegiatan. 2) kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. Sedangkan eksternal yaitu: 1) rendah nya minat masyarakat untuk ikut dalam musyawarah, 2) pemanfaatan dana yang tidak sesuai.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menghadapi kendala-kendala yang mempengaruhi kegiatan simpan pinjam perempuan adalah: 1) terhadap kendala internal memberikan kesempatan kepada tim

pelaksana kegiatan untuk menggunakan sarana-prasarana yang ada di kantor UPK dan memberikan sanksi kepada kelompok SPP yang mengalami tunggakan atau masalah dalam pembayaran angsuran, seperti memblack List anggota yang tidak membayar angsuran pinjaman dan memberikan sanksi kepada desa yang kelompoknya mengalami kredit macet. 2) terhadap kendala eksternal yaitu petugas telah membuat komitmen dengan masyarakat untuk ikut bereperan serta dalam melaksanakan dan menerima kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang ikut berperan, seperti: jika ada rapat, maka bagi anggota yang tidak datang harus menerima segala hasil keputusan rapat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan adalah:

1. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Maka antara petugas pelaksana kegiatan harus menjalin komunikasi yang efektif yang nantinya akan mempermudah hubungan koordinasi antara sesama petugas.
2. Dalam menetapkan usulan kegiatan yang akan didanai pada masa yang akan datang, sebaiknya diutamakan kegiatan yang bersifat pelatihan dan pengembangan keterampilan masyarakat, agar masyarakat mampu bisa mengembangkan potensi yang mereka dapatkan.
3. Sosialisasi PNPM lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model - Model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava media
- Burhan Bungin. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ginanjar Kartasasmita. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi*. Malang : Unibraw Press.
- Lexi J Moleong. 2002. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexi J Moleong. 2005. *Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexi J Moleong. 2007. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Makmuri Muklhas. 2005. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maharuddin Pangewa. 2004. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Miftah Thoha. 2005. *Perilaku organisasi : Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muslim Kasim. 2006. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Indomedia Global.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik ; Formulasi Implementasi dan Evalusi Kinerja*. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2006. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ony S Prijono dkk. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : Centre For Strategis and International Studies.
- Penjelasan Petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan : Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Rahmad Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosada Karya.

- Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sanapiah Faisal. 2005. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sondang P Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan : Konsep, dimensi, dan strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra. 2006. *Peranan Biokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. 2002. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Skripsi

- Robby Maulana, *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (Studi di Nagari Lambah dan Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam*. Skripsi. Ilmu Administrasi Negara UNP. 2010.

Peraturan Perundang-undangan

- Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/kep/menko/kesra/vii/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Internet

- Setia Budi. 2005. *Persepsi Anggota Tentang Peran Pemimpin Kelompok Pada Masyarakat Miskin Kota di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor*. Program Studi Ilmu Penyluhan Pembanguna Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (<http://www.damandri.co.id>), diakses tanggal 7 Maret 2013.

<http://Www.Bps.Go.Id/?News=940> diakses jam 22:13 tanggal 19 februari 2013

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/#ixzz2MrA3WixX>: diakses jam 19:26 tanggal 7 Maret 2013